



Fenomena Authoritarian Leadership Post-Democracy di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya

Nika Amalia Suhendro¹, Maulana Rifai², Indra aditya³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1810631180210@student.unsuka.ac.id, HP. +62 858-1444-7351

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 2 Mei 2022

Direvisi: 6 Mei 2022

Dipublikasikan: Mei 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6557142

Abstract:

In the current era of democracy, every leader has his own character with a distinctive leadership style, as a country that adheres to a democratic system, the implementation of government administration is always required to comply with real democratic principles. But along the way, the development of democracy is colored by various systems that apply, one of which is guided democracy, a system that gives sovereignty to the people, but the decision is determined by the head of government or the president. This is in line with the concept put forward by Colin Crouch related to post-democracy that this condition is in line with the guided democracy system, namely the vagueness of public participation. This research uses qualitative methods and will provide a discussion of post-democracy in guided democracy.

Keywords: *Guided democracy, Post Democracy, Authoritarian Leadership*

PENDAHULUAN

Era reformasi yang ditandai dengan kebangkitan demokrasi di Indonesia menjadi saksi bagi munculnya regulasi baru untuk memperkuat Indonesia dalam mengambil langkah kebijakan yang lebih keberpihakan terhadap masyarakat.

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya.

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin. Padahal semestinya pemimpin merupakan sosok yang menjadi teladan panutan bagi yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin (Sunarto, 2005).

Menurut Kartono (2010), pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Sehingga dapat memunculkan beberapa tipe kepemimpinan. Misalnya tipe-tipe kharismatik, paternalistik, militeristik, otokratis, laissez faire, populis, administratif dan demokratis.

Namun dalam perkembangannya, Era Reformasi memunculkan fenomena menarik, Sebenarnya, demokrasi yang dibelenggu oleh kalangan elite telah terjadi sejak proses gelombang demokratisasi ketiga bergulir. Banyak rezim yang hanya menjadikan demokrasi sebagai prasyarat minimal untuk mendapat label demokratis, tapi pada tataran teknis, publik justru semakin terjauhkan dari proses politik dan proses pengambilan kebijakan. Inilah yang disebut Colin Crouch sebagai fenomena post democracy.

Di mana rakyat kehilangan atau kesulitan mengidentifikasi identitas dan ideologinya dengan partai politik yang ada atau situasi politik yang berkembang sehingga partisipasi terhadap proses politik makin berkurang, sebagai contoh terus menurunnya partisipasi pemilih pada setiap pemilu.

Rakyat hilangnya ruang argumen dan perdebatan di ruang publik karena aktor politik baik pemerintah dan lembaga politik melakukan komunikasi dengan cara cara marketing politik seperti iklan (advertising) menawarkan produk dagangannya sehingga kehilangan greget minus substansi.

Makin eratnya pertalian pemerintah dengan sektor swasta (private) dalam pengertian bahwa orang-orang disektor private lebih memahami cara cara kerja sistem organisasi modern sehingga cara swasta diadopsi oleh pemerintah dan menempatkan orang orang swasta/sektor privat di lembaga-lembaga pemerintah

untuk menjalankan fungsi fungsi politik pemerintah.

Pengaruh globalisasi, walaupun negara demokrasi mengklaim dirinya berdaulat namun pada kenyataannya mereka bertautan dan tunduk pada sistem global, perdagangan, pertahanan melalui program-program dunia/globalisasi.

Privatisasi, demokrasi liberal melahirkan konsekuensi pemerintahan mesti terbuka bekerjasama dengan sektor privat sehingga melahirkan apa yang namanya manajemen pemerintahan privat di mana program-program pemerintah dimasuki oleh sektor sektor privat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) yakni sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Post-Democracy sebagai landasan politik

Post-democracy adalah bukanlah sebuah situasi kembali ke masa pre-democracy, yang ditandai misalnya dengan bercokolnya kembali figur pemimpin tunggal atau sistem politik otoriter. Post-democracy justru hadir ketika lembaga-lembaga berikut mekanisme demokrasi sudah berjalan. Dan biasanya peran masyarakat dalam menentukan kebijakan karena tertutup oleh para pejabat elite.

Menurut Crouch, dewasa ini demokrasi yang mengandalkan peran aktif masyarakat – terutama kelas menengah yang memiliki kepedulian dan kesadaran politik untuk membangun tatanan politik yang berkeadilan, berkemanusiaan dan sederajat (equal) – telah bergeser, ditandai dengan munculnya kelompok baru yang mengambil alih peran masyarakat tersebut. Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, kalangan baru ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah.

Kalangan ini kuat secara ekonomi dan dalam spektrum politik bukanlah pendukung gerakan-gerakan sosial khas kaum kiri. Kalangan ini memiliki kesadaran bahwa melalui penguasaan politik mereka dapat merealisasikan kepentingannya termasuk mengamankan kekuasaan ekonominya. Kalangan ini dalam perkembangannya menciptakan wacana politik baru berikut “opsi-opsi solusi praktis” atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka menggiring pandangan, opini dan sikap politik publik yang diklaim sebagai “kepentingan umum”. Namun, menurut Crouch klaim tersebut bersifat superfisial, karena kepentingan eksklusif merekalah yang pada akhirnya lebih terakomodir. Dalam kondisi seperti ini nuansa superfisial demokrasi atau atmosfer oligarkis menghantui dinamika kehidupan politik riil.

Post-democracy ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)

Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menyelimuti lahirnya Demokrasi Terpimpin yang menurut hemat penulis semua peristiwa tersebut tidak mungkin bisa diungkap satu persatu dalam tulisan yang singkat ini. Tapi yang jelas dalam perjalanan sejarah, perkembangan sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia mulai dari tahun 1945-1959 telah mengalami pasang surut yang tidak henti-hentinya. Perdebatan dan perbedaan pendapat dalam memilih sistem ketatanegaraan terus berlanjut di kalangan para pejuang kemerdekaan ketika itu. Walaupun saat itu Indonesia telah resmi memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara yang merdeka, namun UUD 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 belum mampu menerapkan sistem presidensial sebagaimana yang tertuang di dalamnya.

Prinsip Dwitunggal yang berkembang di masa-masa awal kemerdekaan, akhirnya membuka ruang bagi Muhammad Hatta untuk lebih berperan penting dalam mengatur pemerintahan. Kurangnya peranan Soekarno ketika itu berdampak pada perkembangan dunia perpolitikan yang berjalan lamban. Melihat hal seperti ini, maka pada tanggal 16 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). yang pada saat itu bertugas membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan, mengadakan rapat untuk mendesak Muhammad Hatta yang berkedudukan sebagai Wakil Presiden agar mengeluarkan maklumat. Maka pada tanggal 3 November 1945 keluarlah Maklumat Presiden yang hanya ditanda tangani oleh Muhammad Hatta. Terhitung dari tanggal dikeluarkannya maklumat sampai Mei 1946, jumlah partai politik mencapai 137 partai.

Akibatnya, kehidupan kepartaian berkembang tidak sehat, pengkudetaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 semakin berlanjut. Sistem Presidensial yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya berubah menjadi Sistem Parlementer. Sistem Parlementer yang mulai diberlakukan dua bulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.⁵⁸ Persatuan yang digalang selama menghadapi penjajahan menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Hal ini disebabkan karena lemahnya benih-benih Demokrasi Parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Nasionalis

Perkembangan paham nasionalis di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1921. Dalam hal ini, Soekarno banyak terpengaruh oleh pemikiran HOS Tjokroaminoto yang pada saat itu masih memimpin Partai Serikat Islam sekaligus Partai Nasionalis. (Lambert Gibels, op.cit hlm. 51)

Meskipun pada dasarnya Soekarno lebih kental dengan nuansa demokratis, akan tetapi beliau sangat menjunjung tinggi nasionalis. Pemikiran ini muncul dari seorang Soekarno pada saat menipisnya rasa kebangsaan dalam masyarakat dan berkembangnya paham kesukuan/kedaerahan. Dia melihat bahwa solusi yang sangat diperlukan ketika itu adalah persatuan seluruh rakyat Indonesia dari segala kalangan untuk bangkit melawan keterjajahan. Namun realitas yang ada ternyata masyarakat Indonesia terpecah belah dalam berbagai kelompok dan latar belakang yang berbeda.

Islam

Menurut Soekarno, Islam tidak bertentangan dengan akal, maka untuk penafsiran yang lebih relevan dengan masa kebangkitan, tidak ada salahnya memberikan interpretasi terhadap agama Islam dan sumbernya tentang nilai-nilai sosial dengan mengedepankan akal rasional. Untuk mencapai kemajuan ummat seharusnya lebih kreatif, memandang agama tidak asal terima saja, hendaklah akal digunakan semaksimal mungkin. Dalam hal ini akan terlihat bahwa akal benar-benar digunakan untuk memahami agama Islam secara utuh sesuai dengan perkembangan zaman dimana masyarakat itu terus berkembang. Hal yang demikian ini menurut Soekarno sama sekali tidaklah merugikan Islam. (Husnan Bey Fananie 2010)

Dari beberapa pendapat Soekarno sebagai mana tertulis di atas, dapat dilihat bahwa pemikirannya mengenai Islam sangat dipegaruhi oleh beberapa pemikir rasionalis Islam seperti, Farid Wadjudi, Sjakib Arselan, Muhammad Ali, dan satu nama lagi yang mendapat tempat dalam pemikiran rasionalis Soekarno yaitu, Sayyid Amir Ali. Pemikiran rasional yang berkembang ketika itu sangat mempengaruhi pemikiran Soekarno terutama ketajaman rasionalitasnya dalam berfikir.

Secara garis besar, pemikiran Soekarno tentang Islam dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip, pertama, tidak ada agama kecuali Islam yang lebih mementingkan persamaan, semua orang Islam memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi terhadap Islam, oleh karena itu jangan ada yang memonopoli pemahaman tentang Islam. Kedua, Islam pada dasarnya adalah rasional dan sederhana, hal ini menurut Soekarno untuk menerangkan kelebihan Islam dibanding dengan agama lain. Ketiga, Islam berarti kemajuan, menurut Soekarno Islam

telah cukup mengandung potensi kemajuan, yang berpangkal pada konsep tauhid, dan sifat elastisitas hukum Islam.

Dalam menjalankan demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan sistem presidensial sebagai alat dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara teoritis maupun praktis, demokrasi terpimpin menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hampir seluruh cita-cita yang ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin sudah tertuang dalam batang tubuh (Pembukaan) UUD 1945 dan Pancasila.

KESIMPULAN

Aktualisasi demokrasi harus dilakukan melalui upaya-upaya bersama (golongan, etnis, agama, dan suku bangsa) yang berorientasi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran dan kompetitif. Tuntutan gelombang demokrasi menuju masyarakat yang terbuka dan toleran merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk ambil bagian dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih terbuka dan manusiawi. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengembangan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini tidak mudah, karena demokrasi pada dasarnya butuh kerelaan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak demokratis. Tumbuhnya budaya demokrasi juga butuh dukungan unsur lain, yakni Negara. Negara harus memfasilitasi perangkat-perangkat masyarakat untuk berlangsungnya demokrasi.

Terdapat argumen yang bisa menjelaskan mengapa pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia begitu lamban, pertama, adanya pemahaman doktrinal sebagian masyarakat Islam Indonesia yang menghambat demokrasi, karena gagasan tersebut bisa

dikatakan cukup asing dalam mind-set Islam. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kaum muslimin Indonesia masih cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, karena demokrasi adalah produk Barat sedangkan Indonesia adalah orang 67 Timur yang mempunyai budaya dan peradaban yang berbeda terutama dalam hal agama. Kedua, persoalan kultur, perlu disadari bahwa warisan kultur masyarakat Muslim Indonesia sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang bersifat otokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara.

Akan tetapi, apabila masyarakat Muslim Indonesia mempunyai paradigma tentang demokrasi berbasis Islam, maka nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan terwujud dengan sendirinya. Karena Islam dalam dirinya demokratis, dalam arti tidak hanya prinsip syura (musyawarah), akan tetapi juga karena adanya konsep ijtihad (consensus). Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang Indonesia akan menjadi sebuah Negara pertama yang menganut sistem demokrasi berbasis Islam terbesar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004
- Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, Model Penelitian Agama Dan Dinamika Social, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, cet ke 1
- WawanTunggulAlam, Demi Bangsaaku, Pertentangan Sukarno VsHatta, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2003
- Sunarto. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Amus. Suryabrata,
- Sumadi. 2011. Metodologi penelitian. Jakarta: Rajawali Press. Umar,Husen. 2005

Husnan Bey Fananie, Membaca Kembali
Pemikiran Soekarno Tentang Islam
Dan Demokrasi, Jurnal Himpunan
Peminat Ilmu Ushuluddin, Vol 1
No.1 2010/1432

Rusadi Kartaprawira, Sistem Politik
Indonesia, Suatu Model Pengantar,
Bandung: Sinar Baru, 1977

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu
Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1998

Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,
2004